BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Dasar Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan yang melibatkan dua pihak, pihak pertama berkedudukan sebagai pemilik (*principal*) dan pihak kedua sebagai manajemen (*agent*). Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas namanya, sedangkan agen adalah pihak yang menerima wewenang tersebut dan berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya kepada prinsipal. Dalam konteks perusahaan, prinsipal adalah pemegang saham (investor), sementara agen adalah manajemen atau direksi perusahaan.

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika kepentingan agen tidak selaras dengan kepentingan prinsipal. Agen yang memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal (asimetri informasi) berpotensi untuk bertindak oportunitis demi kepentingan pribadinya, yang dapat merugikan prinsipal.

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)* berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memitigasi perilaku oportunistis manajemen. Mekanisme *GCG* seperti dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komite audit dirancang untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal, sehingga manajemen terdorong untuk menyajikan laporan keuangan secara jujur

dan transparan. Dengan demikian, penerapan *GCG* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan.

2.1.2 Teori Stewardship

Teori stewardship merupakan salah satu teori yang melandasi konsep *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini, di samping teori keagenan (*agency theory*). Teori ini lahir sebagai pandangan alternatif yang mengkritik asumsi teori keagenan yang terlalu pesimis dalam memandang perilaku manajer sebagai pihak yang selalu bertindak oportunistik dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori stewardship didefinisikan sebagai suatu situasi di mana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan kepentingan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa pimpinan merupakan pihak yang memiliki integritas tinggi, kejujuran, serta kemampuan untuk bertindak penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tindakan terbaik guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* maupun *shareholders*. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang steward akan mengerahkan seluruh kemampuan dan keahliannya demi tercapainya tujuan organisasi.

Teori stewardship sebagai gambaran adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang didasarkan pada asumsi filosofis bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki integritas sebagai individu.

2.2 Integritas Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan tersebut dapat dipercaya dan jujur, sehingga dapat mencerminkan keadaan keuangan perusahaan dengan akurat. Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi disusun berdasarkan fakta yang terjadi, bebas dari salah saji material, tidak mengandung unsur manipulasi, serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menjadi dasar yang dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Fikri & Suryani (2020), integritas laporan keuangan adalah kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Mayangsari (2003) mendeskripsikan integritas laporan keuangan sebagai seberapa jauh laporan keuangan disampaikan dengan kejujuran dan kebenaran, sehingga mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya serta tidak membingungkan pihak yang menggunakan laporan keuangan. Sementara itu, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, representasi tepat (*faithful representation*), dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disusun secara jujur, objektif, serta bebas dari bias dan kesalahan material agar memiliki integritas yang tinggi.

Integritas laporan keuangan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan komitmen manajemen dalam menyajikan informasi keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Semakin tinggi integritas laporan keuangan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, maupun pihak lainnya, terhadap informasi yang disajikan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan konservatisme akuntansi yang dimana memliki arti sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana manajemen cenderung tidak melebih-lebihkan laba atau aset perusahaan. Perusahaan yang konservatif akan mengakui kerugian lebih cepat namun menunda pengakuan keuntungan hingga benar-benar terealisasi. Konservatisme dipilih sebagai proksi integritas laporan keuangan karena mencerminkan sejauh mana manajemen menyajikan informasi keuangan secara hati-hati dan tidak berlebihan semakin konservatif perusahaan dalam melaporkan kinerjanya, semakin tinggi integritas laporan keuangannya. Lawan dari konservatisme akuntansi adalah optimisme akuntansi atau agresivitas akuntansi. Konservatisme menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengakui kerugian lebih cepat dan laba lebih lambat, sedangkan optimisme atau agresivitas akuntansi cenderung mengakui laba lebih cepat dan menunda pengakuan kerugian sehingga berpotensi menyebabkan *overstatement* pada laporan keuangan.

2.2.2 Indikator Integritas Laporan Keuangan

Menurut Financial Accounting Standards (2010) No. 2 yang diterbitkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB), integritas laporan keuangan tercermin dari kualitas informasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Representasi yang jujur (*Faithful Representation*)

   Informasi dalam laporan keuangan harus menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi, serta sesuai dengan fakta yang terjadi.

2. Netralitas (*Neutrality*)

   Informasi disajikan secara objektif dan tidak dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu sehingga pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang tidak bias.

3. Bebas dari kesalahan material (*Freedom from Material Error*)

   Informasi harus bebas dari kesalahan material yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan.

Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu laporan keuangan memiliki integritas yang tinggi karena informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3 *Good Corporate Governance* (*GCG*)

Sistem dan praktik tata kelola yang diterapkan dalam perusahaan guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan GCG yang efektif dapat mengakibatkan munculnya integritas dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap data keuangan yang disampaikan (Fujianti et al., 2023). Secara umum *GCG* dapat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada sistem dan struktur yang dapat mengendalikan dan mengawasi

pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodir berbagai *stakeholder* yang berkepentingan dengan perusahaan (Himie, 2022).

Secara teoritis, *GCG* berakar pada teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kondisi tersebut, manajemen memiliki potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam penyajian laporan keuangan. Untuk meminimalkan konflik tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif, yaitu melalui penerapan *Good Corporate Governance*. *GCG* beroperasi sebagai mekanisme yang mengelola interaksi di antara berbagai pihak dalam organisasi serta memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang profesional, terbuka, dan penuh tanggung jawab.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menerangkan bahwa tata kelola perusahaan adalah proses dan prosedur yang menjadi landasan suatu organisasi agar dapat dikelola dan dikendalikan. Pembagian hak dan tanggung jawab ditentukan struktur tata kelola kepada setiap anggota organisasi, seperti dewan, pemegang saham, manajer serta pemangku kepentingan lainnya dan juga aturan maupun prosedur pengambilan keputusan. Sistem tata kelola yang baik memerlukan prinsip-prinsip yang dapat dipegang dan dijadikan komitmen. Prinsip-prinsip *GCG* yang berlaku adalah sebagai berikut:

b. *Accountability* (Akuntabilitas). Berisi kewenangan yang harus dimiliki oleh para petinggi dan kewajiban mereka kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Mengharuskan para pemimpin dan manajer perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya.
d. *Transparancy* (Transparansi). Mengungkapkan informasi secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan keadaan perusahaan.
e. *Fairness* (Keadilan). Semua pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.
f. *Independency* (Independensi). Mempertanyakan para pengelola agar mampu beroperasi secara mandiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya pengaruh dari pihak lain yang tidak sejalan dengan prosedur operasional perusahaan yang ada.

Selain itu, penerapan *GCG* di internal dalam suatu perusahaan diwujudkan melalui beberapa mekanisme, seperti keberadaan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, serta komite audit. Mekanisme tersebut berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara jujur dan dapat dipercaya.

2.3.1 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 6 dewan komisaris merupakan badan

korporasi yang bewenang melaksanakan pengendalian secara umum sesuai peraturan serta memberikan nasihat kepada direksi. Selain itu, berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas mengawasi kebijakan pengurusan oleh direksi serta memberikan nasihat yang bersifat strategis. Dewan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas mandiri yang memastikan bahwa manajemen beroperasi selaras dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya. Terdapat lebih dari 2 (dua) orang dalam dewan komisaris, di mana proporsi komisaris independen harus sekurang-kurangnya 30% dari total jumlah anggota dewan. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, yang dimaksud dengan independen adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun (Prakoso et al., 2016).

Dewan komisaris juga wajib melakukan pengawasan atas terselengaranya Tata Kelola serta wajib melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai syarat. Persyaratan yang harus ditaati untuk menjadi dewan komisaris independen pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independen tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut.

2. Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan, anggota dewan yang lain, dan pemegang saham.
3. Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

2.3.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Gideon, (2005) dalam Untari (2023), kepemilikan manajerial adalah keseluruhan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Tujuannya untuk menyamakan sebuah kepentingan dari manajer dan investor guna mengambil keputusan bersama. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan menurut (Diyan & Erman, 2009) dalam (Asnawi et al., 2019). Manajer yang memiliki saham tentu lebih paham akan kondisi sebenarnya pada perusahaan.

Oleh karena itu, manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari posisi sebagai manajer serta pemilik saham. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham tentunya akan mengambil keputusan secara hati-hati karena keputusan yang diambil akan berdampak pada dirinya sendiri sebagai pemegang saham dari pihak perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak memiliki kepemilikan manajerial, kemungkinan manajer yang bukan pemegang saham perusahaan akan fokus pada kepentingan dirinya sendiri.

2.3.3 Komite Audit

Komite Audit adalah salah satu mekanisme dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pengawasan proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite ini berperan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, bebas dari kesalahan material, dan transparan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan (Wicaksono et al., 2016). Dalam *GCG*, keberadaan komite audit meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, memantau pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan tugas tersebut, komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Audit yang efektif melalui komite audit dapat mengurangi risiko kesalahan penyajian informasi keuangan, sehingga mendukung integritas laporan keuangan perusahaan.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Shinta Maharani (2022) Kemampuan organisasi dalam menciptakan laba dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta menjadi salah satu elemen krusial untuk keyakinan investor terhadap performa finansial perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Profitabilitas yang mencerminkan kapasitas perusahaan untuk menciptakan laba dapat memperkuat keandalan laporan keuangan serta menjadi salah satu elemen penting. Profitabilitas tersebut juga bisa menilai seberapa efisien perusahaan dalam mengatur sumber daya yang dimilikinya sepanjang periode akuntansi demi mencapai hasil laba.

Rasio ini juga dapat memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen di perusahaan. Hal ini tercermin dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi (Syawalina & Fahlevi, 2020). Profitabilitas dinilai dengan menggunakan *Return on Assets (ROA),* yang merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari keseluruhan aset yang dimiliki.

ROA atau *Return on Assets* dipilih sebagai proksi profitabilitas karena merupakan rasio yang paling komprehensif dalam mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. *ROA* mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan, sehingga lebih tepat digunakan dibandingkan proksi lain dalam penelitian ini.

ROA tidak secara langsung mendeteksi integritas laporan keuangan, namun *ROA* yang tinggi dapat menjadi sinyal potensi manipulasi ketika dalam integritas laporan keuangan tidak diimbangi dengan arus kas operasional yang setara. Profitabilitas ini penting bagi integritas laporan keuangan karena mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba merupakan salah satu informasi utama yang menjadi perhatian investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya ingin mempertahankan citra kinerja yang baik di mata publik. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih hati-hati dan transparan guna menjaga kepercayaan investor, sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Audit yang berkualitas tinggi mampu memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan (kompetensi) dan kemauan auditor untuk melaporkan kesalahan tersebut (independensi).

Kualitas audit sering dikaitkan dengan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), seperti KAP yang termasuk dalam kelompok *Big Four*, yang dianggap memiliki standar audit yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih memadai, serta

sistem pengendalian mutu yang lebih baik. Hal ini membuat hasil audit lebih dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Kualitas audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, karena laporan tersebut telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan independen. Sebaliknya, kualitas audit yang rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan, sehingga menurunkan integritas laporan keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Reschiwati & Aryanty (2024)	Independensi Auditor, Struktur *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit; Implikasinya Pada Integritas Laporan Keuangan	**Variabel Independen (X):** Independensi Auditor, Struktur *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit **Variabel Dependen (Y):** Integritas Laporan Keuangan	Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komite audit secara

				parsial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan dan kualitas audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Amelia et al. (2021)	Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel *Moderating*	**Variabel Independen (X):** *Good Corporate Governance* **Variabel Dependen (Y):** Integritas Laporan Keuangan **Variabel Moderate:** Kualitas Audit	Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, kualitas audit memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan, setelah mendapatkan hasil regresi persamaan tersebut ternyata kualitas audit dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional

				terhadap integritas laporan keuangan.
3.	Fujianti et al. (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan	**Variabel Independen (X):** Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit **Variabel Dependen (Y):** Integritas Laporan Keuangan	Dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
4.	Safitri et al. (2023)	Integritas Laporan Keuangan: Apa Saja Hal Yang Mempengaruhinya?	**Variabel Independen (X):** Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Kualitas Audit **Variabel Dependen (Y):** Integritas Laporan	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, kualitas audit memiliki pengaruh

			Keuangan	positif terhadap integritas laporan keuangan.
5.	Alpriyatna & Muhyarsyah (2023)	Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Moderasi Kualitas Audit	**Variabel Independen (X):** Leverage, Profitabilitas **Variabel Dependen (Y):** Integritas Laporan Keuangan **Variabel Moderate:** Kualitas Audit	Leverage dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. kualitas audit mampu memoderasi pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Sumber: Penelitian terdahulu

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dewan komisaris merupakan salah satu unsur dari *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh direksi. Keberadaan komisaris independen yang netral akan memperkuat pengawasan dan kejujuran laporan keuangan, karena laporan tersebut akan lebih terhindar dari kepentingan manajemen (Rasidin & Hariyono, 2024). Komisaris yang tidak terikat memberikan penilaian yang tidak memihak dan penilaian

terhadap kerja manajemen. Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin rendah kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, semakin kuat kinerja komisaris independen, maka semakin baik kualitas laporan keuangan karena pengawasan terhadap tim manajemen akan lebih ketat. Ketika perusahaan sedang menghadapi banyak hal maka dewan komisaris berfungsi untuk memberikan masukan serta memberikan pandangan agar mencegah kecurangan ataupun kesalahan dalam pelaporan sehingga dapat meningkatkan intergitas laporan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alpriyatna & Muhyarsyah, 2023).

H1 = Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai seorang manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan yang ditempati. Ketika seorang manajer memiliki saham diperusahaan dimana ia bekerja, maka ia akan menjalankan dengan baik agar dapat menjaga sahamnya sekaligus. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatan kejujuran serta mengurangi tindakan kecurangan agar menjaga nama baik dan dapat terus mengusahakan yang terbaik untuk saham yang diberikan.

Karena itu, manajer yang memiliki saham cenderung berhati - hati saat membuat keputusan tentang masalah perusahaan. Kepemilikan manajerial yang

memiliki proporsi besar yang ada pada suatu manajer perusahaan akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang sudah diambil, baik keputusan pengambilan yang benar maupun keputusan pengambilan yang cukup keliru. Adanya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan membuat manajer menjadi lebih berhati-hati untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola perusahaan termasuk pada menetapkan integritas laporan keuangan pengelolaan perusahaan, termasuk saat menetapkan kejujuran dalam laporan keuangan (Santoso & Andarsari, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian (Reschiwati & Aryanty, 2024).

H2: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.6.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Berdasarkan teori *Good Corporate Governance* Shleifer & Vishny (1997) Komite audit adalah komponen penting yang bertugas menjaga standar pelaporan keuangan, memastikan adanya transparansi serta tanggung jawab. Penguatan peran komite audit mendorong adanya keterbukaan dan ketepatan dalam laporan keuangan, serta mencegah adanya praktik manipulatif atau penyimpangan laporan keuangan dengan memberikan kontrol

yang ketat dan meminta pertanggungjawaban dari pihak manajemen (Simamarta & Khomsiyah, 2024).

Dengan komite audit yang ada maka akan memeriksa serta mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan yang membantu dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Komite audit memainkan peran krusial sebagai mekanisme pengawasan tambahan yang secara langsung berdampak pada kualitas dan integritas laporan keuangan.

H3: Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.6.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya seperti asset, modal atau penjualan dalam model tertentu. Semakin tinggi laba, maka akan lebih baik bagi perusahaan dan bagi pihak- pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut (Harun et al., 2020). Laba bersih (setelah pajak) juga dapat menjadi indikator integritas laporan keuangan yang baik. Profitabilitas sendiri mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya selama periode akuntansi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen di perusahaan. Hal ini tercermin dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi (Harun et al., 2020).

Secara teori perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik akan mengurangi niat untuk memanipulasi laporan keuangan dimana Perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung memiliki sumber daya serta sistem internal

yang lebih kokoh untuk mengatur risiko finansial dan menjamin ketepatan laporan keuangan. Keuntungan mencerminkan efektivitas dan performa perusahaan, serta menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan hasil yang semakin meningkat kepada pemegang saham.

H4 = Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2.6.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kualitas audit dapat meningkatkan integritas laporan keuangan artinya semakin tinggi kualitas audit maka integritas laporan keuangan juga meningkat. Tugas yang dimiliki auditor ialah untuk memberikan opini atas kewajaran dari hasil laporan keuangan yang disajikan oleh agen yang kendalanya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Ketika laporan keuangan perusahaan diaudit dengan baik akan menciptakan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, mengurangi ketidakpastian terkait kualitas informasi keuangan, dan memberikan keyakinan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Ketika laporan keuangan perusahaan diaudit dengan baik akan menciptakan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, mengurangi ketidakpastian terkait kualitas informasi keuangan, dan memberikan keyakinan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya.

Kualitas jasa audit yang diberikan KAP yang lebih besar akan menghasilkan opini yang lebih baik sehingga meningkatkan integritas laporan

keuangan. Menurut Qonitin & Yudowati (2018) semakin berkualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor maka semakin tinggi integritas laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan kualitas auditor yang baik juga memberikan laporan keuangan yang akurat serta menignkatkan nama perusahaan.

H5 = Kualitas Audit Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan